



RENCANA KERJA

Tahun 2025



DINAS TENAGA KERJA
Kabupaten
Kuantan Singingi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan bahan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025. Renja OPD merupakan penjabaran dari Renstra OPD. Didalamnya juga terdapat review terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2025.

Tulisan sederhana ini berisi gambaran umum pengelolaan pelayanan ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sesuai penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja. Kami menyadari bahwa tulisan sederhana yang akan digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 masih ada kekurangan. Oleh karena itu saran/pendapat atau kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Kami berharap Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, serta kami mengharapkan saran untuk perbaikan perencanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.

Teluk Kuantan, Januari 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Drs. MASNUR, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19671221 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	15
2.3 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan sasaran OPD	29
3.3 Program dan Kegiatan	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
4.1 Rencana Kerja DISNAKER.....	32
4.2 Sumber Pendanaan untuk DISNAKER	35
BAB V PENUTUP	36
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ikhtisar Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Anggaran 2024.....	9
Tabel 2.5 Usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan	27
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah melalui OPD yang bersangkutan.

Rencana kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja OPD juga merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu Renja OPD juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Renja OPD akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber pendanaan lainnya. Adapun seluruh kegiatan yang direncanakan dalam Renja Dinas Tenaga Kerja ini direncanakan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026 sehingga diharapkan capaian program yang maksimal sesuai dengan perencanaan sehingga sasaran yang telah ditetapkan pada renstra dapat terpenuhi. Program dan kegiatan pada Tahun 2025 difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan masalah tenaga kerja dan angkatan kerja di Kabupaten Kuantan Singingi.

Permasalahan tenaga kerja dan angkatan kerja yang sering terjadi adalah jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, mutu tenaga kerja yang relatif rendah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan pengangguran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
23. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
35. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
36. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi
37. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung fungsi tenaga kerja serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal tenaga kerja dan angkatan kerja.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025;

2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
4. Menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis maka dalam menyusun Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja DISNAKER

4.2 Sumber Pendanaan untuk DISNAKER

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 ini dimulai dengan melakukan analisa terhadap pencapaian kinerja OPD tahun 2024 yang bertujuan untuk menggambarkan tingkat capaian dan permasalahan pelayanan OPD. Hasil analisa ini menggambarkan kinerja terhadap pelaksanaan Renja periode sebelumnya yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

Evaluasi terhadap jalannya program dan kegiatan yang telah berlangsung pada tahun ke belakang sangatlah penting. Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program. Dengan melakukan evaluasi kita dapat melihat sejauh mana keberhasilan atau kegagalan program yang sudah berjalan sehingga dapat membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik kedepannya. Dalam melakukan evaluasi diperlukan data yang akurat mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya baik berupa anggaran maupun fisik agar kita dapat menganalisis data tersebut.

Dalam Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 terdapat 5 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan program yang ada pada setiap OPD dan bersifat tetap setiap tahun pada tahun 2024. Pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yang berkaitan dengan urusan kewenangan yang diselenggarakan oleh OPD yaitu urusan tenaga kerja.

Rekapitulasi realisasi kinerja sub kegiatan tahun 2024 dan capaian kinerja Renstra disajikan dalam 2.1 Ikhtisar Reliasasi Kinerja Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Kode Rek	Program / Kegiatan	V olume	Pagu Dana (Rp)	Realisasi	
				Keuangan	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6=5/4 x100
	BELANJA LANGSUNG		Rp 5,724,047,387	Rp 5,362,077,200	93.68
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG TENAGA KERJA		Rp 5,724,047,387	Rp 5,362,077,200	93.68
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp 3,574,855,487	Rp 3,355,312,100	93.86
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 6,000,000	Rp 5,999,500	99.99
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	100.00
2.07.01.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	Rp 3,000,000	Rp 2,999,500	99.98
2.07.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 2,791,332,807	Rp 2,695,603,950	96.57
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	23 org	Rp 2,788,332,807	Rp 2,692,608,950	96.57
2.07.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Lap	Rp 3,000,000	Rp 2,995,000	99.83
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	100.00
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 org	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	100.00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 269,651,880	Rp 201,895,284	74.87
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	Rp 7,000,000	Rp 6,856,000	97.94
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24 Paket	Rp 45,000,000	Rp 42,024,745	93.39
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	Rp 25,000,000	Rp 24,541,500	98.17
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1000 Dok	Rp 5,000,000	Rp 3,600,000	72.00
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	Rp 187,651,880	Rp 124,873,039	66.55
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp 102,334,000	Rp 92,132,000	90.03
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	5 Unit	Rp 42,334,000	Rp 39,200,000	92.60
2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	5 Unit	Rp 30,000,000	Rp 23,532,000	78.44
2.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lain	2 Unit	Rp 30,000,000	Rp 29,400,000	98.00

2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 318,446,800	Rp 281,555,560	88.42
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan	Rp 6,000,000	Rp 5,748,000	95.80
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Rp 8,500,000	Rp 8,500,000	100.00
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20 Laporan	Rp 303,946,800	Rp 267,307,560	87.95
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 77,090,000	Rp 68,125,806	88.37
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Rp 38,530,000	Rp 32,921,707	85.44
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	Rp 33,560,000	Rp 33,534,099	99.92
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	Rp 5,000,000	Rp 1,670,000	33.40
2.07.02.	Program Perencanaan Tenaga Kerja		Rp 33,324,700	Rp 26,992,700	81.00
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Rp 33,324,700	Rp 26,992,700	81.00
2.07.02.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	14 org	Rp 33,324,700	Rp 26,992,700	81.00
2.07.03.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Rp 44,526,600	Rp 31,617,800	71.01
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi		Rp 44,526,600	Rp 31,617,800	71.01
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	20 org	Rp 44,526,600	Rp 31,617,800	71.01
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja		Rp 71,059,400	Rp 58,607,000	82.48
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota		Rp 71,059,400	Rp 58,607,000	82.48
2.07.04.2.01.02	Pelayanan Antar Kerja	30 org	Rp 25,000,000	Rp 22,378,600	89.51
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	60 org	Rp 36,059,400	Rp 26,237,800	72.76
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	16 org	Rp 10,000,000	Rp 9,990,600	99.91

2.07.05	Program Hubungan Industrial		Rp 2,000,281,200	Rp 1,889,547,600	94.46
2.07.05.2.01	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp 46,647,400	Rp 39,699,400	85.11
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	14 Prsh	Rp 15,746,600	Rp 12,514,800	79.48
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	14 Prsh	Rp 13,248,600	Rp 11,978,000	90.41
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	20 lap	Rp 17,652,200	Rp 15,206,600	86.15
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Rp 1,953,633,800	Rp 1,849,848,200	94.69
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	15 Perkara	Rp 13,248,600	Rp 11,993,000	90.52
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	15 Perkara	Rp 8,248,600	Rp 5,948,600	72.12
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	Rp 13,248,600	Rp 12,948,600	97.74
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	8680 org	Rp 1,918,888,000	Rp 1,818,958,000	94.79
	TOTAL		Rp 5,724,047,387	Rp 5,362,077,200	93.68

Untuk program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah terdapat pada beberapa program. Hal ini disebabkan karena dana transfer dari pemerintah pusat terkendala sehingga menjadi tunda bayar dan akan dianggarkan pada tahun berikutnya.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada Lampiran 1 (Tabel T.C 29).

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					Urusan									
2	02				Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
					Program :									
2	02	12			Bidang Urusan Tenaga Kerja									
2	07				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	80 %							
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	8 Dok/ 12 Lap							
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6	75,0%
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	9	75,0%
2	07	01	2.02	8.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan gaji dan tunjangan ASN	100 %						-	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 org/bln	16 org/bln	17 org/bln	17 org/bln	100%	17 org/bln	50	166,7%
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3	75,0%
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti diklat	16 orang	orang	orang	orang	0%	orang	-	0,0%
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 orang	1 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	5	31,3%
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %						-	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	48 paket	7 paket	10 paket	9 paket	90%	9 paket	25	51,7%
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96 paket	15 paket	24 paket	20 paket	83%	20 paket	55	57,3%
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 paket	7 paket	12 paket	9 paket	75%	9 paket	25	51,3%
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	360 dokumen	259 dokumen	1.000 dokumen	480 dokumen	48%	480 dokumen	1.219	338,7%
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380 laporan	47 laporan	90 laporan	55 laporan	61%	55 laporan	157	41,2%
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	4/29 paket/ unit				0%		-	
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 paket	1 paket	5 paket	5 paket	100%	5 paket	11	275,0%
2	07	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 unit	2 unit	5 unit	4 unit	80%	4 unit	10	43,5%
2	07	01	2.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lain	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	4	66,7%
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	%	%	3 %	0%	3 %	6	6,0%
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	480 laporan	53 laporan	120 laporan	93 laporan	78%	93 laporan	239	49,9%
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	6 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	5 laporan	23	47,9%
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 laporan	2 laporan	20 laporan	14 laporan	70%	14 laporan	30	62,5%

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %						-	
2 07 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3	300,0%
2 07 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3	100,0%
2 07 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 unit	2 unit	8 unit	3 unit	38%	3 unit	8	10,7%
2 07 02 2.01	Program Perencanaan Tenaga Kerja				Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	4 Dok			-	0%	-	-	0,0%
2 07 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	0%	- dokumen	-	0,0%
2 07 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	15 perusahaan	- perusahaan	14 perusahaan	7 perusahaan	50%	7 perusahaan	14	93,3%
2 07 03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				Persentase TK Bersertifikat Kompetensi	52,40 %						-	
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi				Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	5 %	%	%	%	0%	%	-	0,0%
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	107 orang	18 orang	20 orang	16 orang	80%	16 orang	50	46,7%
2 07 04 2.01	Program Penempatan Tenaga Kerja				Persentase Penempatan tenaga kerja	20 %						-	
2 07 04 2.01	Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Lowongan Kerja yang tersedia	20 %	%	%	- %	0%	- %	-	0,0%
2 07 04 2.01 02	Pelayanan Antar Kerja				Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	260 orang	106 orang	30 orang	70 orang	233%	70 orang	246	94,6%
2 07 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	260 orang	- orang	60 orang	27 orang	45%	27 orang	54	20,8%
2 07 04 2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja				Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	52 orang	36 orang	16 orang	16 orang	100%	16 orang	68	130,8%
2 07 05	Program Hubungan Industrial				Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	80 %						-	
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Tendaftar di WLKP Online	40 perusahaan	20 perusahaan	14 perusahaan	19 perusahaan	136%	19 perusahaan	58	145,0%
2 07 05 2.01 02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan				Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	12 perusahaan	- perusahaan	14 perusahaan	7 perusahaan	50%	7 perusahaan	14	116,7%
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Tendaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	80 laporan	17 laporan	20 laporan	16 laporan	80%	16 laporan	49	61,3%
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				Persentase Jumlah Perusahaan yang berselisih	100 %	%	%	%	0%	%	-	0,0%
2 07 05 2.02	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Perselisihan yang Dicegah	68 perkara	- perkara	15 perkara	9 perkara	60%	9 perkara	18	26,5%
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada				Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	68 Perkara	12 Perkara	15 Perkara	24 Perkara	160%	24 Perkara	60	88,2%
2 07 05 2.02 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Kerja 50	Asosiasi 8 dan Serikat Kerja	Asosiasi dan Serikat Kerja 20	10 Asosiasi dan Serikat Kerja	50%	10 Asosiasi dan Serikat Kerja	28	56,0%
2 07 05 2.02 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	20 orang	- orang	8.680 orang	8.709 orang	100%	8.680 orang	17.389	86945,0%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada Lampiran 2 (Tabel T.C 30).

Tabel TC. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
1	Tingkat Kesempatan Kerja			94,00 %	94,36 %	94,40 %	94,51 %	97,34 %	97,50 %	97,58 %	97,58 %	97,62 %	Realisasi 2024
2	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun			14,29 %	11,90 %	10,7 %	8,3 %	1,36 %	2,10 %	5,60 %	5,60 %	5,36 %	Realisasi 2024

Berdasarkan analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (Tabel T.C 30) yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan sudah baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja utama yang tertuang dalam lampiran tersebut, dimana walaupun terdapat realisasi kinerja yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan tapi hal ini merupakan perbandingan terbalik, dimana semakin rendah capaian maka semakin baik kinerjanya.

2.3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan.

Tingginya angka tenaga kerja tidak berbanding lurus dengan keteersediaan lapangan pekerjaan, sehingga menyebabkan angka pengangguran yang tinggi. Permasalahan tenaga kerja yang terjadi antara lain, rendahnya produktivitas tenaga kerja, tingkat pendidikan yang minim dimana tidak sesuai jenjang pendidikan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, kemampuan yang tidak sesuai dengan yang diminta dunia kerja dan akses informasi lapangan pekerjaan.

Mutu tenaga kerja yang relatif rendah dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang memengaruhi mutu tenaga kerja. Karena rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tenaga kerja minim dalam penguasaan pengetahuan dan teknologi.

Persebaran tenaga kerja yang tidak merata di samping sumber daya manusia yang relatif masih rendah, sektor ketenagakerjaan juga dihadapkan kepada masalah penyebaran tenaga kerja yang tidak merata.

Pengangguran terjadi jika jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang mengakibatkan tidak semua angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan kerja. Hal ini lebih diperparah dengan banyaknya tenaga kerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, pengangguran juga terjadi sebab angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh dunia usaha.

Jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan angkatan kerja yang besar pula. Angkatan kerja yang besar jika dapat dimanfaatkan dengan baik akan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal itu baru dapat dicapai apabila angkatan kerja seluruhnya terserap oleh kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan di masyarakat. Pernyataan itu dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Jumlah penduduk yang besar ditambah dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang seharusnya menjadi pendorong peningkatan kegiatan ekonomi justru menjadi beban bagi pembangunan ekonomi. Akan tetapi tingkat pertumbuhan penduduk tinggi itu tidak diiringi oleh pertumbuhan kesempatan kerja. Ini adalah penyebab utama terjadinya pengangguran.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2024, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Isu Strategis Regional berdasarkan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 pada bidang tenaga kerja antara lain :

- 1) Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan pekerjaan. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja ditujukan pada penciptaan tenaga kerja profesional, mandiri, memiliki etos kerja yang tinggi, berjiwa wirausaha, dan

berdaya saing tinggi. Sedangkan perluasan kesempatan kerja diarahkan pada penyerapan tambahan angkatan kerja baru, penurunan jumlah penganggur dan setengah penganggur, transformasi tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja antar daerah, dan peningkatan kesempatan kerja bagi berbagai lapisan masyarakat.

- 2) Peningkatan Pengawasan Tenaga kerja asing. Beberapa dampak positif yang timbul karena adanya tenaga kerja asing di Indonesia antara lain sebagai berikut:
 - a. Masuknya ilmu dan teknologi baru di sebuah bidang pekerjaan
 - b. Pengembangan suatu bidang menjadi lebih cepat
 - c. Adopsi teknologi baru cepat terjadi
 - d. Terjadinya peningkatan investasi di Indonesia
 - e. Memicu produktivitas tenaga kerja lokal

Isu Strategis Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 pada bidang tenaga kerja antara lain :

1. Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta kesetaraan gender.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja.
2. Masih rendahnya perluasan kesempatan kerja.
3. Masih rendahnya pengawasan tenaga kerja asing.
4. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan.
5. Masih tingginya angka tingkat pengangguran;
6. Masih rendahnya kemampuan penempatan tenaga kerja;
7. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja.
8. Belum tersedianya Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Kuantan Singingi;
9. Belum adanya akses informasi data bursa kesempatan kerja dalam penyiapan bursa tenaga kerja;
10. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan;

11. Pembinaan kelembagaan hubungan industrial terhadap pengusaha maupun pekerja belum optimal;

Dalam hal berkaitan dengan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi diperlukan rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas, antara lain :

- a. Penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK)
- b. Optimalisasi informasi bursa tenaga kerja
- c. Peningkatan bantuan sarana/parasarana bagi tenaga kerja mandiri
- d. Melaksanakan MoU tenaga kerja lokal dengan Perusahaan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Pada Renja Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi merencanakan sebanyak 5 (lima) program, 12 (duabelas) kegiatan dan sebanyak 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp. 3.480.379.120,- (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) dimana anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun rincian dapat ditampilkan pada Tabel T-C.31

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS TENAGA KERJA KAB. KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS TENAGA KERJA						3.480.379.120,00							3.691.846.400,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.480.379.120,00							3.691.846.400,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						3.480.379.120,00							3.691.846.400,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.105.379.120,00						-	3.279.346.400,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola Memantapk an Kemand irian Ekonomi	-	-	16.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola Memantapk an Kemand irian Ekonomi	-		11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola Memantapk an Kemand irian Ekonomi	-		5.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.172.169.120,00			-	Peningkata n Tata Kelola Memantapk an Kemand irian Ekonomi	-	-	2.252.815.400,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	2.167.169.120,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola Memantapk an Kemand irian Ekonomi	-		2.247.315.400,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Kemandirian Ekonomi	*		5.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*	*			*	20.000.000,00			*	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Kemandirian Ekonomi	*	*	22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Kemandirian Ekonomi	*		22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*	*			*	340.500.000,00			*	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Kemandirian Ekonomi	*	*	374.550.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Kemandirian Ekonomi	*		11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	50.000.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Kemandirian Ekonomi	*		55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Kemandirian Ekonomi	*		44.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1080 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	•	Peningkata n Tata Kelola Memantapik an Kemand irian Ekonomi	•		6.050.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	235.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	•	Peningkata n Tata Kelola Memantapik an Kemand irian Ekonomi	•		258.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	185.000.000,00			•	Peningkata n Tata Kelola Memantapik an Kemand irian Ekonomi	•	-	203.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	•	Peningkata n Tata Kelola Memantapik an Kemand irian Ekonomi	•		71.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	•	Peningkata n Tata Kelola Memantapik an Kemand irian Ekonomi	•		71.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	•	Peningkata n Tata Kelola Memantapik an Kemand irian Ekonomi	•		60.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	208.500.000,00			•	Peningkata n Tata Kelola Memantapik an Kemand irian Ekonomi	•	-	229.350.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				120 Laporan	6.000.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	•	Peningkata n Tata Kelola Memantapk an Kemand itian Ekonomi	•		6.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.500.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	•	Peningkata n Tata Kelola Memantapk an Kemand itian Ekonomi	•		9.350.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				23 Laporan	194.000.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	•	Peningkata n Tata Kelola Memantapk an Kemand itian Ekonomi	•		213.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	164.210.000,00			•	Peningkata n Tata Kelola Memantapk an Kemand itian Ekonomi	•	-	180.631.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	•	Peningkata n Tata Kelola Memantapk an Kemand itian Ekonomi	•		42.383.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	67.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	•	Peningkata n Tata Kelola Memantapk an Kemand itian Ekonomi	•		73.832.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipekhar/Direhabilitasi				1 Unit	33.500.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Kemandirian Ekonomi	*		36.916.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipekhar/Direhabilitasi				20 Unit	25.000.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Kemandirian Ekonomi	*		27.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	*	*			*	65.000.000,00						*	71.500.000,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*	*			*	65.000.000,00			*	Peningkatan Tata Kelola	*	*	71.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*	Peningkatan Tata Kelola	*		71.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	*	*			*	135.000.000,00						*	148.500.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*	*			*	135.000.000,00			*	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Kemandirian Ekonomi	*	*	148.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				32 Orang	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Kemandirian Ekonomi	*		148.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	*	*			*	75.000.000,00						*	82.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	75.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Komanditan Ekonomi	-	-	82.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				70 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Komanditan Ekonomi	-		27.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				30 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Komanditan Ekonomi	-		44.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				14 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Komanditan Ekonomi	-		11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-			-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	55.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Komanditan Ekonomi	-	-	60.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLPK Online				10 Perusahaan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Komanditan Ekonomi	-		22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHER PERODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				4 Perusahaan	15.000.000,00	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Kemandirian Ekonomi	-		16.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPRKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terafiliasi sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				20 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Kemandirian Ekonomi	-		22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	45.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Kemandirian Ekonomi	-	-	49.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				17 Perkara	15.000.000,00	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Kemandirian Ekonomi	-		16.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				7 Perkara	10.000.000,00	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Kemandirian Ekonomi	-		11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	15.000.000,00	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Kemandirian Ekonomi	-		16.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tertaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				8700 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Memantapkan Kemandirian Ekonomi	-		5.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	J U M L A H							3.480.379.120,00							3.691.846.400,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal yang berkaitan terhadap kajian program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang langsung ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dapat disajikan pada Tabel T-C. 32 sebagai berikut:

Tabel T-C. 32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi Riau Kabupaten Kuantan Singingi
Dinas Tenaga Kerja

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase TK Bersertifikat Kompetensi (%)		
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 Kelompok	Lowongan Pekerjaan untuk remaja putus sekolah (Pengusul : Hj. JUNIWARTI)
2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Desa Pebaun, Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 Kelompok	Pelatihan membuat dodol Desa Pebaun (Pengusul : Azrori Analke Apas, A. Md)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 (RPJMN 2025-2029): *“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*, Sasaran pembangunan RKP 2025 antara lain meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju, mengurangi kemiskinan menuju nol persen, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia serta pengaruh internasional. Selain pertumbuhan ekonomi, RKP 2025 juga menekankan pentingnya pembangunan manusia dan pengurangan ketimpangan. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 7-8 persen dan rasio Gini menjadi 0,379-0,382 pada tahun depan. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial, dan mendorong konvergensi program antar lembaga. Selain itu, pemerintah juga akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan jaminan sosial.

Dalam pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional tersebut perlu sinergi perencanaan tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Adapun tema pembangunan tahun 2025 Provinsi Riau adalah *“Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Serta Pemerataan Infrastruktur Untuk Penguatan Ekonomi Daerah”*, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Dasar Dan Kualitas Sdm.

2. Peningkatan Tata Kelola.
3. Pemerataan Infrastruktur yang berkelanjutan.
4. Penguatan Ekonomi melalui Pertanian, Hilirisasi SDA, Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Pariwisata Berbudaya Melayu.

Dalam melaksanakan prioritas pembangunan nasional dan provinsi tahun 2025, tema pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 adalah *“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Kualitas Pelayanan Publik dan Memacu Daya Saing Daerah”*, dengan prioritas pembangunan antara lain :

1. Kemandirian Ekonomi
2. Pelayanan Publik yang Prima

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional dan provinsi, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menuangkan dalam arah kebijakan dan program prioritas pembangunan tahun 2025. Adapun arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang mendukung di bidang tenaga kerja yakni *meningkatkan kualitas tenaga kerja*. Dinas Tenaga Kerja mendukung prioritas pembangunan daerah yakni prioritas *“Memantapkan Kemandirian Ekonomi”*.

3.2. Tujuan dan Sasaran OPD

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Pengukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Tujuan Dinas Tenaga Kerja adalah **“Menurunnya Angka Pengangguran”**

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin

suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Sasaran Dinas Tenaga Kerja adalah:

1. Meningkatnya kesempatan kerja.
2. Meningkatnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi disajikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PER TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5				
1	Menurunnya Angka Pengangguran	1	Meningkatnya kesempatan kerja	94,00	94,36	94,40	94,51	94,73
		2	Meningkatnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	14,29	11,9	10,7	8,3	5,95

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Misi IV RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi, serta untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi maka ditetapkan program kegiatan yang direncanakan Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 4.

Misi IV : **MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI YANG MEMILIKI DAYA SAING MELALUI PEMANFAAAN POTENSI SEKTOR UNGGULAN DAERAH**

Tujuan 1 : Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing

Sasaran 2 : Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran

Dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi terlebih dahulu telah merumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan diambil

dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan dari rencana kerja yang disusun awal, diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada pelaksanaan Renja awal, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada.

Program dan Kegiatan didasarkan pada kesesuaian sasaran RPJMD dan tujuan OPD serta efisiensi atas dasar evaluasi program/kegiatan yang berjalan pada Renja awal. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi yaitu sebagai unit pelayanan di bidang tenaga kerja.

Untuk Mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi maka ditetapkan program dan kegiatan yang direncanakan Tahun 2025 sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

C. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Sub Kegiatan :

1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

D. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

1. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pelayanan antar Kerja
2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja
3. Perluasan Kesempatan Kerja

E. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
2. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
3. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
4. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

4.2. Sumber Pendanaan untuk Dinas Tenaga Kerja

Pada Renja Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi merencanakan sebanyak 5 (lima) program, 12 (duabelas) kegiatan dan sebanyak 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp. 3.480.379.120,- (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) dimana anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan kerja selama tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021-2026. Renja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran pada OPD Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025 sehingga dalam penyusunan RKA sudah mempunyai acuan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatifnya. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan diharapkan akan bisa mengcover seluruh kebutuhan program manajemen kepegawaian.

Program dan kegiatan tahun 2025 dititikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan keterampilan pencari kerja dengan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja serta peningkatan hubungan industrial.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran sudah mempunyai arah yang jelas.